

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
KOORDINASI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri dan perdagangan telah berperan besar dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah, pertama menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, kedua sebagai sumber pendapatan masyarakat dan ketiga sebagai penopang utama pembangunan sektor-sektor lain dan penggerak perekonomian daerah maupun nasional.

Perkembangan sektor industri dan perdagangan di Jawa Tengah dapat dilihat dari perkembangan unit usaha (IKM/UKM), penyerapan tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi dan sumbangan terhadap PDRB. Secara umum kondisi makro perekonomian Jawa Tengah cenderung semakin meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sektor industri dan perdagangan sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB dan terjaga kestabilan ekonomi perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan pelaku usaha agar Pemerintah Daerah serta stakeholder agar lebih proaktif melaksanakan upaya tersebut.

Inflasi Jawa Tengah pada Tahun 2017 tercatat sebesar 3,71%, lebih tinggi dari Tahun 2016 sebesar 2,36% dan lebih tinggi dari Inflasi nasional sebesar 3,61%. Selama Tahun 2017 Inflasi sangat dipengaruhi oleh *administrated price* (tarif listrik, bensin dan perpanjangan STNK) dan harga komoditas pangan yang fluktuatif (*volatile food*) antara lain beras, cabe dan bawang. Walaupun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, namun masih dikisaran target 4 ± 1 . Permasalahan inflasi sebagian besar bersifat fundamental dan struktural yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan membutuhkan keterlibatan pihak terkait untuk menanganinya.

B. Permasalahan

1. Dibutuhkan suasana aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menghadapi Hari Raya Keagamaan melalui ketersediaan, kelancaran distribusi dan kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat.
2. Di era globalisasi, produk kerajinan Jawa Tengah belum berdaya saing.
3. TPID Kabupaten/Kota di Jawa Tengah banyak yang belum berperan aktif mengkoordinir pengendalian inflasi di daerahnya
4. Pertumbuhan ekonomi/PDRB didominasi 3 (tiga) sektor utama lapangan usaha : industri pengolahan, pertanian dan perdagangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan Industri dan perdagangan adalah mensinergikan berbagai kebijakan/kegiatan dalam rangka koordinasi pengembangan industri dan perdagangan, kerjasama antar provinsi dan informasi ekonomi regional.

B. Tujuan

1. Terbentuknya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan pelaku usaha agar lebih pro aktif menghadapi hari raya keagamaan, khususnya Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
2. Mengembangkan industri kerajinan secara terintegrasi dan bersinergi diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk.
3. Mengetahui tingkat pengendalian inflasi di kabupaten/kota dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan komoditas kepokmas di daerah.
4. Mengetahui perkembangan kegiatan terkait bidang perindustrian dan perdagangan.

III. SASARAN DAN BENTUK KEGIATAN

1. Sasaran

Yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah :

- a. Instansi terkait Provinsi
- b. Kabupaten/Kota

- c. Stakeholder
- d. Kementerian terkait

2. Keluaran

- a. Terlaksananya Rapat Koordinasi Ekonomi, Keuangan dan Industri daerah (EKUINDA) menghadapi hari besar Keagamaan Tahun 2019.
- b. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Kerajinan Daerah.
- c. Terlaksananya koordinasi TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/Kota
- d. Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi bidang perindustrian dan perdagangan.

3. Hasil

- a. Terbentuknya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan pelaku usaha agar lebih pro aktif menghadapi hari raya keagamaan, khususnya Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
- b. Mengembangkan industri kerajinan secara terintegrasi dan bersinergi diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk kerajinan Jawa Tengah.
- c. Mengetahui tingkat pengendalian inflasi di kabupaten/kota dalam menjaga kestabilan harga di daerah.
- d. Mengetahui perkembangan dan keterkaitan bidang perindustrian dan perdagangan.

4. Sumber dan Anggaran

Sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar Rp. 600.000.000,-.

5. Kegiatan

- | | |
|--|-----------|
| a. Rakor Ekuinda | : 1 kali |
| b. Rakor Pengembangan Kerajinan | : 2 kali |
| c. Koordinasi TPID | : 15 kali |
| d. Koordinasi dan konsultasi bidang perindag | : 20 kali |

6. Jadwal Kegiatan

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Rakor Ekuinda | : Mei |
| b. Rakor Pengembangan Kerajinan | : Maret dan September |
| c. Koordinasi TPID | : Januari-Desember |
| d. Koordinasi dan konsultasi bidang perindag | : Januari-Desember |